



**RENCANA KINERJA TAHUNAN ( RKT )  
BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA  
BANJARMASIN  
TAHUN 2021**



## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmatnya maka penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 mempunyai maksud dan tujuan untuk menjadi dasar dalam menetapkan kinerja tahunan sehingga dapat menciptakan tolak ukur kinerja sebagai alat untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran organisasi, juga untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur dalam tahun 2021. Sesuai dengan amanat Undang-Undang tersebut diatas Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sementara ini disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 – 2021. Diharapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Keuangan Daerah dapat dijadikan acuan dalam mewujudkan peningkatan kinerja di Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin.

Demikian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin ini dapat kami susun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021.

Banjarmasin,

2020

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH,



H. SUBHAN NOR YAUMIL, SE, M.SI  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19710421 199803 1 009

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i	
DAFTAR ISI	ii	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	2
	1.3. Maksud dan Tujuan	3
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Badan Keuangan Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Badan Keuangan Daerah	4
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	5
	2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	6
BAB III	RENCANA KINERJA	
	3.1. Tujuan dan Sasaran Strategis	8
	3.2. Indikator dan Target Kinerja Tahun 2021	8
BAB IV	PENUTUP	9



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin; (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7) sebagai pelaksanaan dari amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah telah terjadi perubahan nomenklatur Perangkat Daerah Kota Banjarmasin. Berdasarkan diktum kedua Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, mengamanatkan kepada daerah yang telah menetapkan Perda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah untuk segera melakukan penyesuaian dokumen rencana pembangunan daerah sesuai kelembagaan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 11) diperlukan dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2016-2021. Dokumen perencanaan dan penganggaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjalanan roda pemerintahan daerah.

Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah tahun 2021, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Misi Badan Keuangan Daerah Tahun 2016-2021. Adapun Misi Badan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :

Misi

Misi Ke 1 : Menciptakan manajemen pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien.

Misi Ke 2 : Mewujudkan tertatanya administrasi pengelolaan aset daerah sehingga tercapai data dan nilai aset daerah yang meyakinkan.

Misi Ke 3 : Mewujudkan terlaksananya prinsip-prinsip administrasi publik dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah yang meliputi prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis, berkeadilan, transparansi dan akuntabilitas.

Misi ke 4 : Meningkatkan kualitas SDM yang berkompetensi profesional.

Misi ke 5 : Melakukan evaluasi terhadap kepuasan pelanggan.

Misi ke 6 : Memperbaiki sistem secara berkesinambungan.

Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Tahun 2021 merupakan output dari proses perencanaan yang akan dijadikan sebagai pedoman dan arah bagi penyelenggaraan pemerintahan di Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin.

## 1.2 Landasan Hukum

Dalam Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021, peraturan perundangan yang digunakan sebagai rujukan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025;
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin; (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7) ;
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2016 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 11);
11. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 90 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin.



### 1.3.Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan Daerah Tahun 2021 dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan acuan Badan Keuangan Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang mengacu pada RKPD Kota Banjarmasin Tahun 2020 dan berpedoman pada Draft Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Daerah Tahun 2016-2021. Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2021.

Berpijak pada maksud tersebut, maka tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Tahun adalah sebagai berikut :

1. Sebagai acuan Badan Keuangan Daerah dalam mengoperasionalkan RKPD Kota Banjarmasin Tahun 2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Banjarmasin.
2. Menetapkan program dan kegiatan Badan Keuangan Daerah.
3. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Keuangan Daerah;
4. Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana program dan kegiatan Badan Keuangan Daerah.

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Badan Keuangan Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Badan Keuangan Daerah.

Renstra Perangkat Daerah Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Badan Keuangan Daerah ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah selama tahun 2019 dan tahun berjalan 2020 serta perkiraan target anggaran Tahun 2021.

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Badan Keuangan Daerah 2019 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2019 telah dilaksanakan, dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh

- 1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada Perangkat Daerah Badan Keuangan Daerah dalam pelaksanaan Renja 2019 tidak ada Program/Kegiatan yang target kinerja hasil/keluaran tidak memenuhi.
- 2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Pada Perangkat Daerah Badan Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Renja 2019 Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran.
- 3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dalam Renja 2019 Perangkat Daerah Badan Keuangan Daerah tidak ditemukan.
- 4) Faktor - faktor penghambat dan pendorong penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya

atau melebihi target kinerja program/kegiatan :

- Faktor Penghambat :

- a. Kualitas penyusunan keuangan masih belum optimal
- b. Kualitas pengelola keuangan SKPD masih kurang memadai
- c. Belum disusunnya Analisis Standar Belanja (ASB)

- Faktor Pendorong :

- a. Anggaran yang sangat mendukung
- b. Motivasi dari penyusun Laporan Keuangan cukup
- c. Motivasi dari pengelola laporan keuangan cukup tinggi

5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah  
Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian

Program Renstra Perangkat Daerah Badan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Badan Keuangan Daerah tahun 2016-2021 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat kecamatan Denpasar utara pada umumnya.
  - b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Badan Keuangan Daerah berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan pada Badan Keuangan Daerah.
- 6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut
- a. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para PPTK yang menangani kegiatan,
  - b. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Keuangan Daerah.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.



Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Badan Keuangan Daerah sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, pemasyarakatan dan administrasi Pemerintah di Pemerintah Kota Banjarmasin semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di Kota Banjarmasin.

Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah dan juga indikator kinerja, output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah


Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya Perangkat Daerah Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin berpedoman sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 91 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin.

Adapun Tugas Pokok Badan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :

Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan daerah dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Adapun fungsi Badan Keuangan daerah adalah :

1. Perumusan Kebijakan teknis pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota;
2. Perumusan kebijakan operasional, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi pendataan dan penetapan PBB, BPHTB dan Pajak Daerah lainnya;
3. Perumusan kebijakan operasional, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi penagihan dan pengawasan PBB, BPHTB dan Pajak Daerah lainnya;
4. Perumusan kebijakan operasional, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi penyusunan anggaran;
5. Perumusan kebijakan operasional, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi pengelolaan investasi dan penyertaan modal daerah;
6. Perumusan kebijakan operasional, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi pengelolaan perbendaharaan;
7. Perumusan kebijakan operasional, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi akuntansi keuangan;

- 
8. Perumusan kebijakan operasional, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi administrasi aset daerah;
  9. Pembinaan pengendalian dan unit pelaksanaan teknis;
  10. Pembinaan pengendalian urusan kesekretariatan.

## **BAB III**

### **RENCANA KINERJA**

#### ***3.1. Tujuan dan Sasaran Strategis***

Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin mempunyai tujuan dalam melaksanakan kinerja disektor pencapaian dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan pelayanan pajak daerah kepada masyarakat. Tugas pokok Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin berkaitan dengan RPJMD Tahun 2016-2021 tepatnya pada Misi 5 yaitu “ Melaksanakan pemerintahan amanah, ramah, bersih, dan profesional berbasis teknologi informasi dan komunikasi serta memaksimalkan fungsi melayani sebagai suatu tanggungjawab terhadap masyarakat dan Tuhan YME. Dan sesuai dengan hal tersebut di atas maka tujuannya adalah “ Meningkatkan Pemerintahan Yang Bersih dan Akuntabel”.

Sebagai sasaran strategis Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin yaitu : meningkatnyakualitas pengelolaan keuangan daerah dan meningkatnya derajat desentralisasi dan kemandirian daerah.

#### ***3.2 Indikator dan Target Kinerja tahun 2021***

Indikator Kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin terdiri dari :

- a. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah
- b. Meningkatnya derajat desentralisasi dan kemandirian daerah



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin 2021, merupakan rencana kerja tahunan yang disusun untuk menjabarkan Rencana Strategis Bakeuda Kota Banjarmasin Tahun 2016 - 2021, dan dalam rangka mendukung tercapainya Visi dan Misi Kepala Daerah, target dan sasaran pembangunan daerah. Perencanaan kinerja merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapai sasaran dan program yang telah ditetapkan pada tahun yang direncanakan.

Selain itu Renja Bakeuda Kota Banjarmasin juga merupakan dokumen perencanaan tahunan yang diharapkan dapat menjadi acuan dalam menentukan arah dan rencana ke depan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan serta kemampuan sumber daya dan pembiayaan yang berasal dari APBD Kota Banjarmasin Tahun 2021.

Dengan disusunnya Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bakeuda Kota Banjarmasin Tahun 2021.

Banjarmasin, 2021

Kepala Badan,



**H. SUBHAN NOR YAUMIL, SE, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19710421 199803 1 009

Agar lebih jelasnya mengenai sasaran, indikator, program, dan kegiatan yang terkait kinerja Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan		Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target		
5 02 01		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>						<b>36.209.393.201</b>	
5 02 01	2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>						<b>19,200,000</b>	
5 02 01	2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Tersusunnya Dokumen PK,PK Perubahan,IKU,RKT dan RKT Perubahan Tersusunnya Dokumen Renstra,Renja dan Renja Perubahan	5 Dokumen 3 Dokumen	Terpenuhnya layanan administrasi keuangan dengan baik Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 % 100 %	8,400,000
5 02 01	2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Renstra dan Renja Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersusunnya Laporan Kinerja, Rencana Fisik Kegiatan (RFK),LPPD dan LKPJ	2 Dokumen 2 Laporan 4 Laporan	Terpenuhnya layanan administrasi keuangan dengan baik Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 % 100 %	10,800,000
5 02 01	2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>						<b>30.160.393.201</b>	
5 02 01	2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Perencanaan Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Persentase Gaji dan Tunjangan yang di Bayarkan Persentase Terbayarkannya Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	100 % 100 %	Terpenuhnya layanan administrasi keuangan dengan baik Terpenuhnya Layanan Administrasi Umum dengan baik	100 % 100 %	30.155.423.201
5 02 01	2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Perencanaan Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Persentase Terfasilitasinya Administrasi Keuangan	100 %	Terpenuhnya layanan administrasi keuangan dengan baik Terpenuhnya Layanan Administrasi Umum dengan baik	100 % 100 %	4,970,000



5	02	01	2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>						<b>261,515,000</b>		
5	02	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Terlaksananya Perencanaan Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	150 Stell	Tercapainya Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100 %	61,515,000
5	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Perencanaan Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	-	100 %	Tercapainya Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100 %	Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 200,000,000
5	02	01	2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>						<b>2,884,130,000</b>		
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Perencanaan Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Persentase Tersedianya Listrik/Penerangan Kantor	100 %	Terpenuhinya Layanan Administrasi Umum dengan baik	100 %	50,839,000
5	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya Perencanaan Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Persentase Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	100 %	Terpenuhinya Layanan Administrasi Umum dengan baik	100 %	137,981,500
5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Perencanaan Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Persentase Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Persentase Tersedianya Alat Tulis Kantor Persentase Tersedianya Makanan dan Minuman Harian Pegawai, Rapat dan Tamu	100 % 100 % 100 %	Terpenuhinya Layanan Administrasi Umum dengan baik	100 %	290,075,250
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Perencanaan Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Jumlah Penggandaan	30000 Lembar	Terpenuhinya Layanan Administrasi Umum dengan baik	100 %	166,677,000
5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Perencanaan Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Persentase Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100 %	Terpenuhinya Layanan Administrasi Umum dengan baik	100 %	18,000,000
5	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Perencanaan Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	-	100 %	Terpenuhinya Layanan Administrasi Umum dengan baik	100 %	Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 86,165,000
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Perencanaan Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	100 %	Terpenuhinya Layanan Administrasi Umum dengan baik	100 %	2,134,392,250
5	02	01	2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>						<b>207,210,000</b>		
5	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Terlaksananya Perencanaan Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Persentase Terpenuhinya Pengadaan Mebeleur	100 %	Terpenuhinya Layanan Administrasi Umum dengan baik	100 %	127,760,000
5	02	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Perencanaan Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Persentase Terpenuhinya Peralatan Gedung Kantor	100 %	Terpenuhinya Layanan Administrasi Umum dengan baik	100 %	79,450,000

5	02	01	2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							<b>1,213,591,000</b>		
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Perencanaan Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Persentase Tersedianya Fasilitas Komunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik	100 %	Terpenuhinya Layanan Administrasi Umum dengan baik	100 %		597,101,000
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Perencanaan Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Persentase Jasa Kebersihan Kantor	100 %	Terpenuhinya Layanan Administrasi Umum dengan baik	100 %		616,490,000
5	02	01	2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							<b>1,463,354,000</b>		
5	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Perencanaan Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Terpelihara Persentase Terfasilitasinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Persentase Terfasilitasinya Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	59 Unit 100 % 100 %	Terpenuhinya Layanan Administrasi Umum dengan baik	100 %		57,550,000
5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Perencanaan Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	PersentaseTerfasilitasinya jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan dan oajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas operasionaln	100 %	Terpenuhinya Layanan Administrasi Umum dengan baik	100 %	Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	499,650,000
5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Perencanaan Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Persentase Terfasilitasinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	100 %	Terpenuhinya Layanan Administrasi Umum dengan baik	100 %		644,034,000
5	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Perencanaan Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 %	Persentase Terfasilitasinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Persentase Terpenuhinya Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	100 % 100 %	Terpenuhinya Layanan Administrasi Umum dengan baik	100 %		262,120,000

5	02	02			<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>						<b>16.031.566.560</b>		
5	02	02	2.01		<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>						<b>1.191.650.000</b>		
5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Persentase Penyertaan Modal Perusahaan Daerah Pasar (dari total 50 juta sesuai Perda Nomer 1 Tahun 2017)	0	Tersusunnya Dokumen KUA dan PPAS	2 Dokumen	Tersusunnya Dokumen Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %		57,330,000
5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Persentase Penyertaan Modal Perusahaan Daerah Pasar (dari total 50 juta sesuai Perda Nomer 1 Tahun 2017)	0	Tersusunnya Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen	Tersusunnya Dokumen Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %		77,500,000
5	02	02	2.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Persentase Penyertaan Modal Perusahaan Daerah Pasar (dari total 50 juta sesuai Perda Nomer 1 Tahun 2017)	0	Terlaksananya review RKA SKPD	1 kali	Tersusunnya Dokumen Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40,000,000
5	02	02	2.01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Persentase Penyertaan Modal Perusahaan Daerah Pasar (dari total 50 juta sesuai Perda Nomer 1 Tahun 2017)	0	Terlaksananya Review Perubahan RKA SKPD	1 Kali	Tersusunnya Dokumen Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %		38,040,000
5	02	02	2.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Persentase Penyertaan Modal Perusahaan Daerah Pasar (dari total 50 juta sesuai Perda Nomer 1 Tahun 2017)	0	-	100 %	Tersusunnya Dokumen Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45,000,000
5	02	02	2.01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Persentase Penyertaan Modal Perusahaan Daerah Pasar (dari total 50 juta sesuai Perda Nomer 1 Tahun 2017)	0	-	100 %	Tersusunnya Dokumen Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45,000,000
5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Persentase Penyertaan Modal Perusahaan Daerah Pasar (dari total 50 juta sesuai Perda Nomer 1 Tahun 2017)	0	Tersusunnya Dokumen Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	3 Dokumen	Tersusunnya Dokumen Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %		121,330,000
5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Persentase Penyertaan Modal Perusahaan Daerah Pasar (dari total 50 juta sesuai Perda Nomer 1 Tahun 2017)	0	Tersusunnya Dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	3 Dokumen	Tersusunnya Dokumen Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %		115,000,000
5	02	02	2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Persentase Penyertaan Modal Perusahaan Daerah Pasar (dari total 50 juta sesuai Perda Nomer 1 Tahun 2017)	0	Tersusunnya Dokumen Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Penyusunan Anggaran SKPD	2 Dokumen	Tersusunnya Dokumen Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %		652,450,000



5	02	02	2.02	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>							<b>291,861,000</b>		
5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Persentase Penyertaan Modal Perusahaan Daerah Pasar (dari total 50 juta sesuai Perda Nomer 1 Tahun 2017)	0	Meningkatnya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Per Periode Terlaksananya Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban (SPJ) Tersusunnya Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas ,dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	100 % 2 Kali 5 Laporan	Tersusunnya Laporan Penatausahaan Keuangan SKPD yang tertib	100 %		113,625,000
5	02	02	2.02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Persentase Penyertaan Modal Perusahaan Daerah Pasar (dari total 50 juta sesuai Perda Nomer 1 Tahun 2017)	0	Persentase terlaksananya Belanja	100 %	Tersusunnya Laporan Penatausahaan Keuangan SKPD yang tertib	100 %		132,200,000
5	02	02	2.02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Persentase Penyertaan Modal Perusahaan Daerah Pasar (dari total 50 juta sesuai Perda Nomer 1 Tahun 2017)	0	-	100 %	Tersusunnya Laporan Penatausahaan Keuangan SKPD yang tertib	100 %	Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	46,036,000

5	02	02	2.03	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>							<b>641,680,000</b>		
5	02	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Persentase Peningkatan penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBD	4 Kali	Tercapainya penyusunan laporan keuangan SKPD yang tepat waktu dan valid	100 %		106,690,000
5	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	Tersusunnya Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banjarmasin	3 Laporan	Tercapainya penyusunan laporan keuangan SKPD yang tepat waktu dan valid	100 %		168,940,000
5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	Tersusunnya Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Banjarmasin	5 Dokumen	Tercapainya penyusunan laporan keuangan SKPD yang tepat waktu dan valid	100 %		116,490,000
5	02	02	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %			Tercapainya penyusunan laporan keuangan SKPD yang tepat waktu dan valid	100 %	Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	249,560,000
5	02	02	2.04	<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>							<b>13.434.975.560</b>		
5	02	02	2.04	02	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Persentase Penyertaan Modal Perusahaan Daerah Pasar (dari total 50 juta sesuai Perda Nomer 1 Tahun 2017)	0					Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000

5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Persentase Penyertaan Modal Perusahaan Daerah Pasar (dari total 50 juta sesuai Perda Nomer 1 Tahun 2017)	0	Persentase Terpenuhiya Pengelolaan dana mendesak dan darurat Terlaksananya pengalokasian dan penyaluran bantuan keuangan khusus	100 % 12 bulan		Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13.334.975.560
---	----	----	------	----	---------------------------------------	--	---	---	-------------------	--	--	----------------

5	02	04			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>							<b>5.709.748.000</b>
5	02	04	2.01		<b>Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah</b>							<b>5.709.748.000</b>
5	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase Peningkatan penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah	10 %	Tersusunnya Rumusan Kebijakan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah yang Berbasis Teknologi Informasi	1 Dokumen	Terpenuhiya Perencanaan Pengembangan Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	100 %	738.610.000
5	02	04	2.01	05	Pendaftaran dan Pendaftar Objek Pajak Daerah	Persentase Peningkatan penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah	10 %	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah	100 %	Terpenuhiya Perencanaan Pengembangan Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	100 %	697.292.000
5	02	04	2.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Persentase Peningkatan penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah	10 %	Persentase Terfasilitasinya Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Persentase Terlaksananya Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	100 % 100 %	Terpenuhiya Perencanaan Pengembangan Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	100 %	980.750.000
5	02	04	2.01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Persentase Peningkatan penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah	10 %	-	100 %	Terpenuhiya Perencanaan Pengembangan Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	100 %	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 350.000.000



5	02	02	2.05		<b>Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah</b>							<b>471,400,000</b>		
5	02	02	2.05	02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Persentase Penyertaan Modal Perusahaan Daerah Pasar (dari total 50 juta sesuai Perda Nomer 1 Tahun 2017)	0	-		100 %			Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	235,700,000
5	02	02	2.05	03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Penyertaan Modal Perusahaan Daerah Pasar (dari total 50 juta sesuai Perda Nomer 1 Tahun 2017)	0	-		100 %			Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	235,700,000
5	02	03			<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>							<b>1.959.370.500</b>		
5	02	03	2.01		<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>							<b>1.959.370.500</b>		
5	02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	Persentase Peningkatan penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	Tersusunnya Dokumen Standar Harga Berdasarkan Jenis dan Tipe Barang	2 Dokumen	Terkelolanya Barang Milik Daerah yang Tepat dan Valid	100 %			130,000,000
5	02	03	2.01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Persentase Peningkatan penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	Terlaksananya Koordianasi dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milk Daerah	4 Kali	Terkelolanya Barang Milik Daerah yang Tepat dan Valid	100 %			65,490,000
5	02	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Persentase Peningkatan penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	-	100 %	Terkelolanya Barang Milik Daerah yang Tepat dan Valid	100 %		Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22,334,500
5	02	03	2.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Persentase Peningkatan penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	-	100 %	Terkelolanya Barang Milik Daerah yang Tepat dan Valid	100 %		Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	124,050,000
5	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Persentase Peningkatan penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	Terlaksananya Koordinasi Pengamanan Fisik,Administrasi dan Hukum Barang Milk Daerah	4 Kali	Terkelolanya Barang Milik Daerah yang Tepat dan Valid	100 %			927,335,000
5	02	03	2.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Persentase Peningkatan penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	Terlaksananya Koordiansi Hasil Penialaian Barang Milik Daerah	4 Kali	Terkelolanya Barang Milik Daerah yang Tepat dan Valid	100 %			213,720,000
5	02	03	2.01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Peningkatan penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	-	100 %	Terkelolanya Barang Milik Daerah yang Tepat dan Valid	100 %		Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	110,246,000
5	02	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan,	Persentase Peningkatan penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	Terlaksananya Koordinasi Pengawasan dan	10 Kali	Terkelolanya Barang Milik Daerah yang Tepat dan Valid	100 %			230,365,000
5	02	04	2.01	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Persentase Peningkatan penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah	10 %	-	100 %	Terpenuhinya Perencanaan Pengembangan Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	100 %		Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	171,751,000

